



## **LAPORAN KINERJA TAHUN 2017**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah. Secara khusus Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan.

Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada Personil Pilihan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Teamwork) yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya secara maksimal.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan dengan penanganan yang baik (*good governance*/yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dan perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Kinerja ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP melalui pembangunan partisipatif yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, demokratis yang dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada hukum dan keadilan, mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan mandiri serta berdaya saing tinggi dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintah dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, atas koreksi dan saran perbaikan Laporan Kinerja ini dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Sekian dan terima kasih.

Malang, Januari 2018  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MALANG

**Drs. BAMBANG ISTIAWAN**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670303 198602 1 003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Disamping itu, Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 ini merupakan realisasi dan capaian kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, akan dikemukakan secara singkat tentang hasil pengukuran terhadap Sasaran-Sasaran yang telah ditetapkan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pencapaian Tujuan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, demikian pula langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala yang kemungkinan akan terjadi pada tahun mendatang, lewat ringkasan sebagai berikut :

- A. Sasaran *Pertama* : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal;.
- B. Sasaran *Kedua* : Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik
- C. Sasaran *Ketiga* : Pemulihan Masyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih baik
- D. Sasaran *Keempat* : Tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan alokasi anggaran yang ada untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sesudah Perubahan Anggaran sebesar Rp. 7.406.616.066,- (Tujuh milyar empat ratus enam juta enam ratus enam belas ribu enam puluh enam rupiah) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun 2017.

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.420.963.166,- (Satu milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.297.975.413,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) atau 91,34% (sembilan puluh satu koma tiga puluh empat persen), Belanja Langsung sebesar Rp. 5.985.652.900,- ( Lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 5.296.520.402,- (Lima milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah) atau 88,49% sisa dana sebesar Rp. 812.120.251,- (Delapan ratus dua belas juta seratus dua puluh dua ratus lima puluh satu rupiah).

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan;
3. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegasi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, gladi lapang dan sebagainya;
3. Penambahan Jumlah personil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegasi.

Antisipasi ke depan yang akan terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan kepada keseluruhan manajemen resiko bencana.

Semoga pencapaian Sasaran di tahun mendatang akan lebih mengarah pada suatu kondisi yang lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Malang, Januari 2018

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MALANG

**Drs. BAMBANG ISTIAWAN**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670303 198602 1 003

## D A F T A R   I S I

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
1. Organisasi Perangkat Daerah	3
2. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2016	12
D. Dasar Hukum	20
E. Sistematika	21
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>23</b>
A. Perencanaan Strategis	23
1. Tujuan dan Sasaran	23
2. Kebijakan dan Program	25
B. Perjanjian Kinerja	28
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>30</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
1. Capaian Kinerja	31
1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 2017	31
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016	32
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	33
1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	34
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	34
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	42
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	43
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	44
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
B. Realisasi Anggaran	46
C. Prestasi Tahun 2017	49
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>50</b>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- Rencana Kinerja Tahun 2017
- Pengukuran Kinerja Tahun 2017

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrogis dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Malang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik disebabkan faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten Malang yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan **penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.**

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 2 (dua) buah peraturan daerah sebagai amanat dari Undang-undang nomor 24 tahun 2007, yaitu : (1) Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Komitmen dan kewajiban formal sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengharuskan bahwa, setiap realisasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan wajib dilakukan dengan menerapkan mekanisme pertanggungjawaban publik yang valid, terukur, dan sah lewat penyusunan Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good

governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Malang tahun 2017 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2017.

Penyusunan LKPJ berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017.

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 selain memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang kepada Bupati Malang ini telah disusun sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKj ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2017.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana terjadi.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

### **C. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- A. Kepala Badan;
- B. Unsur Pengarah; dan
- C. Unsur Pelaksana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menurut Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011 komposisinya sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretaris pelaksana, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
  1. Seksi Pencegahan; dan
  2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
  1. Seksi Kedaruratan; dan
  2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
  1. Seksi Rehabilitasi; dan
  2. Seksi Rekonstruksi.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :
  1. Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan BPBD;
3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana BPBD;
4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Pelaksana BPBD;
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD; dan
6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
  - c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikannya;
  - d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  - e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
  - f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
  - g. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran BPBD;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis BPBD;
  - e. Melaksanakan pengurusan pembayaran hak-hak keuangan;
  - f. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis BPBD;
  - g. Mengkompilasikan dan menyusun hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas BPBD; dan
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis BPBD;
  - c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan BPBD;
  - d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
  - e. Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan BPBD;
  - f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan BPBD;
  - g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan BPBD;
  - h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang penanggulangan bencana;
  - i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang penanggulangan bencana;
  - j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :

1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya;
  - b. Melaksanakan pemantauan terhadap :
    - Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
    - Penggunaan teknologi tinggi.
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan penyusunan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. Melakukan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistim peringatan dini;
  - c. Menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. Melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. Menyiapkan lokasi evakuasi;
  - f. Menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap darurat bencana;
  - g. Menyediakan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; dan

- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
  2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
  4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  5. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan
  6. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :

1. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - b. Menentukan status keadaan darurat bencana;
  - c. Menyelamatkan dan mengevaluasi masyarakat terkena bencana;
  - d. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - f. Melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Logistik mempunyai tugas :

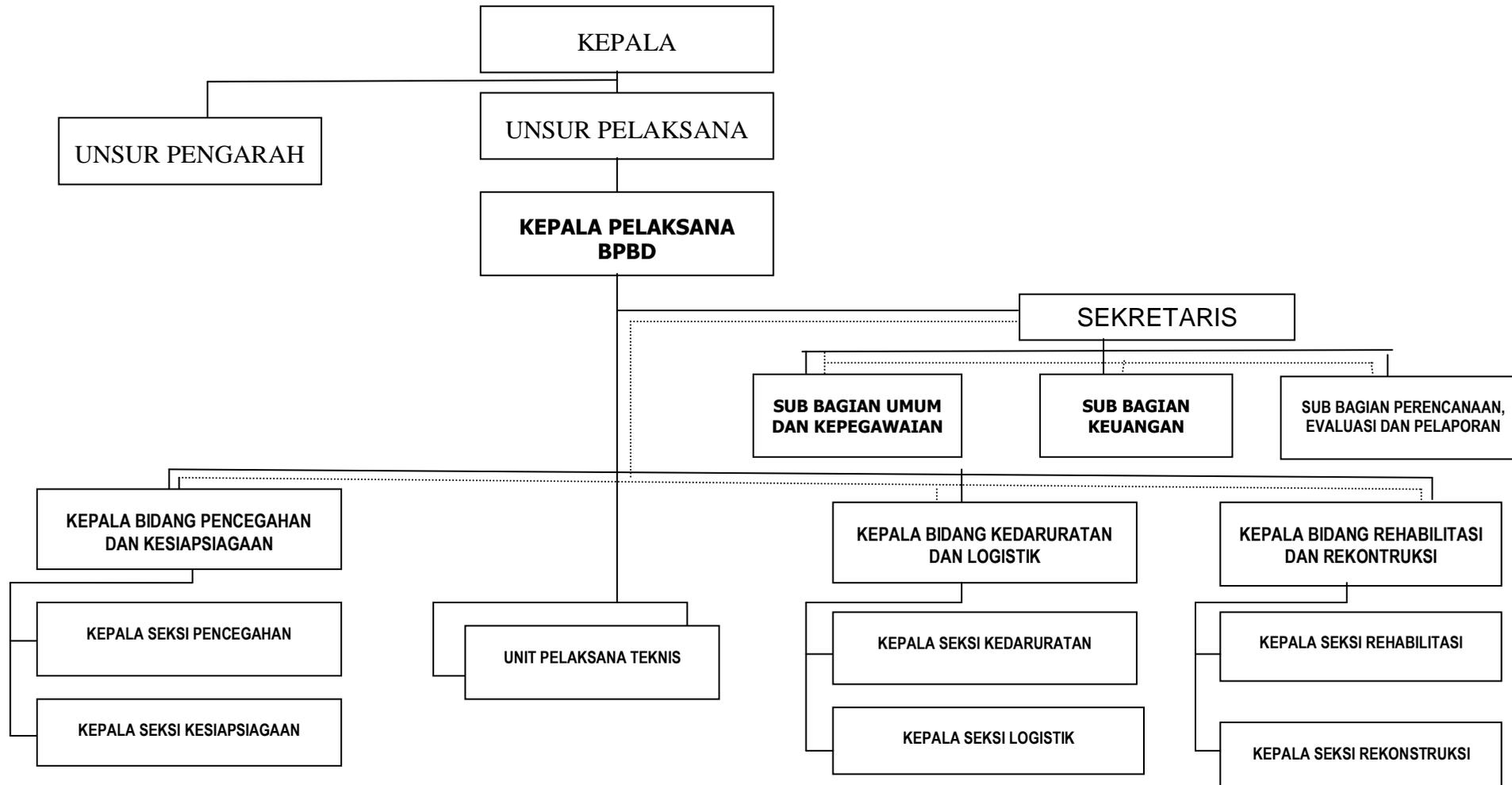
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - b. Melaksanakan pendistribusian logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
  4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :

1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. Melaksanakan pelayanan kesehatan;
  - e. Melaksanakan rekonstruksi dan resolusi konflik;
  - f. Melaksanakan pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta pelayanan publik; dan
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. Melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. Meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - g. Meningkatkan fungsi pelayanan publik;
  - h. Meningkatkan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAGAN STRUKTUR  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**Keterangan :**

\_\_\_\_\_ .....= Garis Komando

## 2. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2016

Capaian Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2016 di uraikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	75 %	75,75 %
2	Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik	Persentase Penanganan bencana	100 %	100 %
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	80 %	79 %

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, diketahui bahwa capaian semua indikator dapat dikatakan mengalami keberhasilan antara lain :

A. Pada Indikator indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 75%, tercapai 75,75 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (25 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) capaian sebesar 101 % dapat dikatakan **sangat berhasil**, indikator ini di dukung oleh Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam dengan kegiatan :

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Kegiatan ini selama tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 34 kali pemantauan sebagai berikut :

- a. Bulan Januari 4 kali kegiatan ke Kecamatan Wagir, Pakisaji, Kromengan dan Sumberpucung;
- b. Bulan Pebruari 2 kali kegiatan ke Kecamatan Pagak dan Kalipare;

- c. Bulan Maret 2 kali kegiatan ke Kecamatan Ngajum dan Wonosari;
  - d. Bulan April 4 kali kegiatan ke Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Wajak dan Pagelaran;
  - e. Bulan Mei 2 kali kegiatan ke Kecamatan Dampit dan Turen;
  - f. Bulan Juni 2 kali kegiatan ke Kecamatan Bantur dan Sumbermanjing Wetan;
  - g. Bulan Juli 4 kali kegiatan ke Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Poncokusumo, Ampelgading dan Tirtoyudo;
  - h. Bulan Agustus 2 kali kegiatan ke Kecamatan wajak dan Bantur;
  - i. Bulan September 2 kali kegiatan ke Kecamatan Ampelgading dan Kasembon;
  - j. Oktober 2 kali kegiatan ke Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo;
  - k. Nopember 5 kali kegiatan ke Kecamatan Ampelgading, Singosari, Poncokusumo, Jabung, dan Tumpang; dan
  - l. Desember 2 kali kegiatan ke Kecamatan Bantur dan Kasembon.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.  
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pembelian antara lain :
- A. Pembelian Barang inventaris :
    - a. Pembelian 1 unit Excavator;
    - b. Pembelian 1 buah mobil operasional ( HILUX)
    - c. Pembelian 1 unit truk
    - d. Karoseri 1 unit truk
    - e. Pembelian 2 unit Laptop
  - B. Pembelian barang yang diserahkan kepada masyarakat :
    - a. 600 buah Bronjong
    - b. Alat Pelindung Diri :
      - Kaos 10 buah
      - Helm 10 buah
      - Topi 15 buah
      - Ransel 10 buah
      - Rompi 10 buah
      - Sarung tangan 10 buah
      - Webbing 1 set
3. Rencana Pengurangan Resiko Bencana  
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Mei 2016 di Aula PMI Kabupaten Malang dengan peserta sebanyak 50 orang terdiri dari Kasi Trantib di Daerah rawan bencana, PMI, LPBI NU,

Universitas/Akademisi, perwakilan BPBD dan Relawan. Hasil kegiatan antara lain :

1. Sosialisasi untuk mereview Dokumen RPB Kabupaten Malang
2. Menyusun Forum RPB Kabupaten Malang yang terbentuk :
  - Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ( Joni Samsul Hadi, ST, M.Si)
  - Wakil Ketua : Ketua LPB NU Kab Malang (Hikma Bawaqih)
  - Anggota: Relawan ( Rurid, Sudarmanto dan Husnul)

Forum ini pada tahun 2017 akan membentuk kepengurusan Forum PRB Kabupaten Malang beserta pengikutnya.

4. Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana  
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2016 bertempat di Pendopo Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 100 orang peserta Camat, Danramil dan Kapolsek sekabupaten Malang dan Kasatpol PP, materi yang diberikan antara lain :
  - Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana
  - Pengolahan Data dan Informasi Bencana
  - Peran Polri dalam Penanggulangan Bencana

Hasil dari Kegiatan Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan peran serta semua aparat maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana.

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana  
Kegiatan pembentukan Desa Tangguh ini telah dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2016 di Desa Tamansari Kecamatan Ampelgading dengan pelatihan dan Gladi lapang masyarakat yang berada di daerah rawan bencana guna melatih kesiapsiagaan masyarakat secara mandiri apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Desa Tangguh Bencana yang telah terbentuk sebanyak 27 Desa yaitu :
  1. Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo terbentuk tahun 2011;
  2. Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo terbentuk tahun 2011;
  3. Desa Sidoasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan terbentuk tahun 2011;
  4. Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan terbentuk tahun 2011;
  5. Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji terbentuk Tahun 2012;
  6. Desa Wonorejo Kecamatan Singosari terbentuk Tahun 2012;
  7. Desa Taji Kecamatan Jabung terbentuk Tahun 2012;
  8. Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang terbentuk Tahun 2012;

9. Desa Mangliawan Kecamatan Pakis terbentuk Tahun 2013;
  10. Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung terbentuk Tahun 2013;
  11. Desa Pait Kecamatan Kasembon terbentuk tahun 2013;
  12. Desa Pandansari Kecamatan Ngantang terbentuk tahun 2013;
  13. Desa Gedangan Kecamatan Gedangan terbentuk tahun 2014;
  14. Desa Sumberringin Kecamatan Wajak terbentuk tahun 2014;
  15. Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon terbentuk tahun 2014;
  16. Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan terbentuk Tahun 2014;
  17. Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading terbentuk tahun 2015;
  18. Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon terbentuk Tahun 2015;
  19. Desa Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak terbentuk pada Tahun 2015;
  20. Desa Bantuarejo Kecamatan Ngantang terbentuk pada Tahun 2015;
  21. Desa Tamansari Kecamatan Ampelgading terbentuk pada Tahun 2016;
  22. Desa Ngroto Kecamatan Pujon terbentuk pada Tahun 2016;
  23. Desa Ngabab Kecamatan Pujon terbentuk pada Tahun 2016;
  24. Desa Wonokerto Kecamatan Bantur terbentuk pada Tahun 2016;
  25. Desa Karangasari Kecamatan Bantur terbentuk pada Tahun 2016;
  26. Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan terbentuk pada Tahun 2016 dan
  27. Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan terbentuk pada Tahun 2016.
6. Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)  
Sosialisasi PENA Sekolah pada tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 25 kali kegiatan yaitu :
1. Bulan Pebruari 1 kali kegiatan di SDN Bangelan 1 Kecamatan Wonosari
  2. Bulan Maret 5 kali kegiatan di SD Ngajum 5 Kecamatan Ngajum, SD Sumberpucung 3 Kecamatan Sumberpucung, SD Ngadirejo 2 Kecamatan Kromengan, SD Sitirejo 4 Kecamatan Wagir dan SD Kendalpayak Kecamatan Pakisaji
  3. Bulan April 2 kali kegiatan di SD Tambakasri 9 Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan SD Jambangan Kecamatan Dampit
  4. Bulan Mei 2 kali kegiatan di SD Tlogorejo 3 Kecamatan Pagak dan SD Bantur 6 di Kecamatan Bantur

5. Bulan Juni 2 kali kegiatan di SD Sukowilangun 1 Kecamatan Kalipare dan SD Kedok Kecamatan Turen
6. Bulan Juli 2 kali kegiatan di SD Mambul Ulum Kecamatan Pagelaran dan SD satu atap dan SMP 1 di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo
7. Bulan Agustus 2 Kegiatan di SD Wonokero 1 Kecamatan Pakisaji dan SD Tambakasri 1 Kecamatan Tajinan
8. Bulan September 2 kegiatan di SD Tamanharjo 1 Kecamatan Singosari dan SD Wandanpuro 2 Kecamatan Bululawang
9. Bulan Oktober 2 kali kegiatan di SD Pujiharjo 2 Kecamatan Tirtoyudo dan SD Tamansari 3 Kecamatan Ampelgading
10. Bulan Nopember 3 kali kegiatan di SD Dengkol 2 Kecamatan Singosari, SD Saptorenggo 4 Kecamatan Pakis dan SD Malangusuko 1 Kecamatan Tumpang, dan
11. Bulan Desember 2 kali kegiatan di SD Ngijo 2 Kecamatan Karangploso dan SD Taji 1 Kecamatan Jabung.

- Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain :
  - a. Melakukan kerjasama dengan USAID – APIK;
  - b. Memberdayakan relawan peduli bencana, dan
  - c. Melatih relawan Siaga Bencana.
- Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pelatihan tenaga BPBD untuk meningkatkan kemampuan SDM;
  - b. Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan kerjasama USAID-APIK;
  - c. Mengajukan Proposal Program dan Kegiatan ke BNPB;
  - d. Penambahan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
- Indikator ini didukung oleh Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam.

B. Pada Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100%, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 56 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 56 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan **sangat berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pembelian paket sembako sebanyak 400 paket yang diperuntukkan bagi korban bencana
2. Pengembangan sistim Penanggulangan Bencana di Daerah, Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2016 yang diikuti oleh Kasi Trantib dan Staf Kecamatan se wilayah Kabupaten Malang bertempat di Hotel Tidar, Kegiatan ini guna meningkatkan kompetensi dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan kaji cepat sebagai tolok ukur penentu kebijakan penanganan bencana, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
  1. Peningkatan pengetahuan untuk mengkaji kerusakan dan kerugian infrastruktur
  2. Pemahaman untuk menentukan proiritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyintas/pengungsi secara tepat dan tepat
  3. Untuk memahami pengaturan serta alur distribusi bantuan dan penyebaran relawan
  4. Untuk mengetahui sistem koordinasi dukungan dari pemerintah daerah setempat, serta
  5. Untuk mengetahui pentingnya keberadaan Pusdalops dalam situasi tanggap darurat.
3. Tanggap Darurat di Daerah terkena bencana  
Kegiatan ini telah dilaksanakan selama tahun 2016 sebanyak 56 kejadian bencana yang telah ditangani, antara lain : Erupsi gunung Bromo sebanyak 2 kali kejadian, Angin puting beliung sebanyak 7 kali kejadian, Tanah longsor sebanyak 35 kali kejadian, Banjir sebanyak 7 kali kejadian, gempa sebanyak 4 kali kejadian, tanah gerak 1 kali kejadian.

- Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain :
  - a. Adanya dukungan dan logistik yang memadai dalam penanganan tanggap darurat bencana;
  - b. Koordinasi dan komunikasi lintas organisasi perangkat daerah dan lembaga-lembaga/ potensi lainnya terkait penanggulangan bencana terjalain dengan baik;
  - c. Didukung sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang cukup untuk tugas-tugas penanganan tanggap darurat bencana.
- Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan penyediaan dana, logistik dan peralatan yang cukup dalam penanganan tanggap darurat bencana ;
  - b. Meningkatkan sinergitas antara organisasi perangkat daerah dan lembaga/potensi lainnya yang terkait dalam penanganan penanggulangan bencana;
  - c. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanggulangan bencana secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, simulasi/gladi lapang dan lainnya
  - d. Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, termasuk gotong royong dengan masyarakat.
- Indikator ini didukung oleh Program Kedaruratan dan Logistik

C. Pada Indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan target 80% tercapai 79% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek terdampak yang ditangani di bagi dengan jumlah Data base obyek terdampak (Sisa obyek yang belum ditangani tahun lalu sebanyak 12 obyek, obyek terdampak tahun ini 7 obyek, jumlah obyek terdampak yang harus ditangani sebanyak 19 obyek obyek yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahun 2016 sebanyak 15 obyek ), Capaian 98,75 % dapat dikatakan **berhasil** kegiatan ini didukung Oleh Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana) sebanyak 5 Obyek dan dari Dana Tak Terduga sebanyak 10 obyek yaitu :

1. Perbaikan Jembatan Klangon Desa Pandansari Kecamatan Ngantang;

2. Perbaikan Jembatan Sambong Desa Pandansari Kecamatan Ngantang;
3. Perbaikan Jembatan Rekesan Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon;
4. Perbaikan Jembatan Mbacok Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon;
5. Rehabilitasi Dinding Penahan Jembatan Druju Desa Bendosari Kecamatan Pujon;
6. Pembangunan Dinding penahan Desa Bendosari Kecamatan Pujon;
7. Pembangunan Dinding Penahan Desa Wonokerto Kecamatan Bantur;
8. Rehabilitasi saluran/gorong gorong Desa Sumberputih Kecamatan Wajak;
9. Pembangunan Jembatan Desa Wajak Kecamatan Wajak;
10. Rehabilitasi Dinding penahan Desa Sumberputih Kecamatan Wajak;
11. Rehabilitasi Dinding penahan Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo;
12. Rehabilitasi Dinding penahan Desa Wonosari/ Pandansari Kecamatan Poncokusumo;
13. Rehabilitasi Dinding penahan Desa Sukosari/Pandansari Kecamatan Poncokusumo;
14. Rehabilitasi Dinding penahan Desa Sukodadi Kecamatan Wagir; dan
15. Rehabilitasi Dinding penahan Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Program Kedaruratan dan Logistik Penanggungan Bencana, Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang sistematis dan terukur dalam upaya penanggulangan bencana. Upaya yang dapat dilakukan baik dalam bentuk

peningkatan kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang dapat dikurangi.

Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian bencana adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

#### **D. DASAR HUKUM**

Pedoman yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

9. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017.

## **E. SISTEMATIKA**

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
  - 1. Organisasi Perangkat Daerah
  - 2. Capaian Kinerja Tahun 2016
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Perencanaan Strategis
  - 1. Tujuan dan Sasaran
  - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1. Capaian Kinerja
    - 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
    - 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016
    - 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
    - 1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
  - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
  - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
    - 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
    - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
    - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2017

BAB IV : PENUTUP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Penetapan Kinerja 2017
- Pengukuran Kinerja 2017
- Rencana Kinerja Tahunan 2017
- Renstra Tahun 2016 - 2021

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis yang disusun tersebut mengandung tujuan dan sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) OPD yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BPBD. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

#### **1. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **TUJUAN**

*Tujuan* adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan Tujuan didasarkan pada pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang ke arah perubahan dari hasil analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai di masa datang. Dengan Tujuan yang

telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu Misi.

Sehubungan dengan itu, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan Tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

- Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal;
- Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik;
- Meningkatkan pemulihan Masyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih baik;
- Mengoptimalkan tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun secara berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Mengacu pada pengertian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan Sasaran yang dapat disusun keterkaitan dengan Tujuan sebagai berikut :

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal;.
- Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik;
- Pemulihan Masyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih baik;
- Tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

### **KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah suatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional.

Sehubungan dengan pengertian di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa tangguh bencana;
- Meningkatkan peran relawan, perempuan, kampus, LSM, dasawisma siaga bencana, pengenalan bencana pada sekolah, sekolah sadar bencana dalam menyiapkan masyarakat menghadapi bencana;
- Meningkatkan peran forum PRB dan Forum/KKN tematik;
- Meningkatkan peran dunia usaha dalam perannya dalam penanggulangan bencana;
- Meningkatkan kecepatan Assesment/Kaji Cepat;
- Meningkatkan anggaran untuk dukungan logistik dan peralatan;
- Meningkatkan pengadaan peralatan evakuasi korban bencana;
- Meningkatkan penguatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
- Meningkatkan penguatan jumlah sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat;
- Meningkatkan tertib administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Implementasi dari kebijakan di atas akan diwujudkan dalam bentuk produk surat-surat dinas ataupun pembuatan petunjuk operasional/prosedur tetap yang akan dijadikan sebagai Pedoman pelaksanaan kegiatan, Pengaturan mekanisme kegiatan lanjutan dan pendorong motivasi bagi staf dalam melaksanakan tugas.

### **PROGRAM**

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu, dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan Program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap Bidang dan Sekretariat;

- b. Memperhatikan Program Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi.

Program dimaksud oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah disusun sebagai berikut :

1. Program Kerja Lima Tahun :

Program Kerja Lima Tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang disesuaikan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah digariskan dengan rinci sebagai berikut :

a. Program Kerja Pembinaan :

Dalam mengantisipasi Tujuan dan Sasaran serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka cukup beralasan untuk perlu dilakukan pembinaan dari dalam terhadap aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkesinambungan dengan maksud agar dapat mengimbangi perkembangan kemajuan yang terjadi dalam masyarakat.

b. Program Kerja Penyuluhan Masyarakat :

Sebagai tindak lanjut dari perwujudan tujuan akhir maka penyuluhan terhadap masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan secara terus-menerus.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana :

Faktor penunjang utama dalam operasional dan pelayanan serta pembinaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana, maka peningkatan sarana dan prasarana termasuk pilihan prioritas dalam mendukung peningkatan kinerja.

2. Program Kerja Tahunan :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

- Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
  - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- f. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam :
- Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.
- g. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
  - Rencana Pengurangan Resiko Bencana;
  - Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
  - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana;
  - Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH).
- h. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana :
- Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana;
  - Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah;
  - Peningkatan Penanganan Kedaruratan;
  - Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana;
  - Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana.

- i. Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana :
  - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Yang Rusak (Pasca Bencana);
  - Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana;
  - Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana.
- j. Program Mitigasi Bencana :
  - Mitigasi Struktural;
  - Mitigasi Non Struktural.
- k. Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan :
  - Penyusunan Laporan Hasil Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kebencanaan.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	77 %
2	Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik	Persentase Penanganan Bencana	100 %
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	81 %

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing bidang dan sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan entry point untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam hal pengumpulan data kinerja dimaksudkan agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektifitas. Untuk melakukan pengumpulan data kinerja secara efektif dan efisien perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Adapun pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah dibawah ini merupakan hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam tahun anggaran 2017 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 4 (empat) formulir pengukuran kinerja dalam pendekatan *activity basic management* pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerja. 4 (empat) formulir tersebut adalah :

1. Rencana Strategis 2016-2021 ( RENSTRA )
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT 2017)
3. Perjanjian Kinerja (Jakin 2017)
4. Pengukuran Kinerja (PK 2017)

Dalam pengukuran kinerja, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## 1. Capaian Kinerja Tahun 2017

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	77%	100%	77%
2	Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik	Persentase Penanganan bencana	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	81%	100%	81%

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	
			2017	2017	2016
1	2	3	4	6	7
1	Terwujudnya Peemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	77%	100%	75,75%
2	Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik	Persentase Penanganan bencana	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	81%	100%	79%

**Tabel. 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kewaspadaan akan kerawanan bencana alam	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana	32 Desa	20 Desa	
		Persentase kemampuan tentang kebencanaan	90 %	100%	
		Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	90 %	100%	
		Nilai SKM pelayanan Kebencanaan	80	95	
2	Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik	Persentase Penanganan darurat bencana	100 %	100 %	
		Persentase bantuan logistik dan persentase dukungan peralatan penanggulangan bencana	100 %	100 %	
		Persentase bantian sosial terhadap korban bencana	100 %	100 %	
3	Peningkatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang terjadi	Jumlah obyek terdampak yang ditangani	85 %	79 %	

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI NASIONAL	KET
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	77 %	-	
2	Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik	Persentase Penanganan bencana	100 %	-	
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	81 %	-	

## 2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut, diketahui bahwa capaian semua indikator dapat dikatakan mengalami keberhasilan antara lain :

- A. Pada Indikator indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 77%, tercapai 77% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana (33 komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali 100 persen) capaian sebesar 100% dapat dikatakan **berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam, Program

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, Program Mitigasi Bencana dan Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan dengan kegiatan :

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam :

Kegiatan ini selama tahun 2017 telah dilaksanakan sebanyak 33 kali pemantauan sebagai berikut :

- a. Bulan Januari : 6 kali kegiatan ke Kecamatan Wajak, Sumbermanjing Wetan, Donomulyo, Kasembon, Ngantang dan Pujon;
- b. Bulan Maret : 3 kali kegiatan ke Kecamatan Sumberpucung, Wagir dan Tajinan;
- c. Bulan April : 3 kali kegiatan ke Kecamatan Wajak, Tumpang dan Donomulyo;
- d. Bulan Juni : 4 kali kegiatan ke Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Gedangan dan Bantur;
- e. Bulan Juli : 2 kali kegiatan ke Kecamatan Kasembon dan Bantur;
- f. Bulan Agustus : 2 kali kegiatan ke Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Bululawang;
- g. Bulan September : 4 kali kegiatan ke Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Lawang, Bantur dan Gedangan;
- h. Bulan Oktober : 2 kali kegiatan ke Kecamatan Bululawang dan Ngantang;
- i. Bulan November : 4 kali kegiatan ke Kecamatan Bululawang, Poncokusumo, Tirtoyudo, dan Ngantang; dan
- j. Bulan Desember : 3 kali kegiatan ke Kecamatan Sumberpucung, Tirtoyudo, Donomulyo dan Tirtoyudo.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pembelian antara lain :

- ♦ Pembelian barang yang diserahkan kepada masyarakat :
  - a. Sirine Manual sebanyak 40 unit;
  - b. Rambu-Rambu Jalur Evakuasi sebanyak 16 unit; dan
  - c. Alat Pelindung Diri :
    - Tas Ransel sebanyak 150 buah
    - Kaos sebanyak 150 buah
    - Topi sebanyak 150 buah

3. Rencana Pengurangan Resiko Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 24-27 Juli 2017 di Hotel Solaris dengan peserta sebanyak 30 orang terdiri dari Bappeda, Dinas PU Bina

Marga, Dinas PU Cipta Karya, Dinkes, DPK, Dinsos, Disparbud, Satpol PP, Polres Malang, Kodim 0818 Malang, Perum Perhutani Malang, Kasi Trantib dan Perwakilan Perangkat Desa Terdampak/Masyarakat/Relawan. Hasil kegiatan antara lain :

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kontinjensi Ancaman Bencana Tsunami kabupaten Malang;
2. Adanya kesepahaman persepsi tentang bagaimana mengurangi resiko bencana Tsunami;
3. Adanya pemutakhiran data tentang data kapasitas, kerentanan dan sarpras yang digunakan dalam penyusunan dokumen renkon tersebut.
4. Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana  
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 15-17 Mei 2017 bertempat di Hotel Solaris Kabupaten Malang yang dihadiri oleh 48 orang peserta diantaranya TNI, POLRI, DPMD, Bappeda, BPKAD, Dinsos, Dinkes, Satpol PP serta Kepala Desa, materi yang diberikan antara lain :
  - a. Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana;
  - b. Peran POLRI dalam Penanggulangan Bencana;
  - c. Manajemen Penanggulangan Bencana
  - d. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ancaman Bencana
  - e. Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana;
  - f. Manajemen Tanggap Darurat Bencana; dan
  - g. Penghitungan Kerusakan Akibat Bencana.

Hasil dari Kegiatan Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan peran serta semua aparat maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana.

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana  
Kegiatan pembentukan Desa Tangguh ini telah dilaksanakan pada Bulan Februari dan Maret 2017 dengan pelatihan dan Gladi lapang masyarakat yang berada di daerah rawan bencana guna melatih kesiapsiagaan masyarakat secara mandiri apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Desa Tangguh Bencana yang telah terbentuk sebanyak 3 Desa yaitu :
  1. Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo terbentuk pada Bulan Februari Tahun 2017;
  2. Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang terbentuk pada Bulan Maret Tahun 2017; dan
  3. Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon terbentuk pada Bulan Maret Tahun 2017.

6. Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH).

Sosialisasi Pena Sekolah pada tahun 2017 telah dilaksanakan sebanyak 25 kali kegiatan yaitu :

1. Bulan April : 8 kali kegiatan di MTs Al Fatoni Kecamatan Poncokusumo, MTsN Kepanjen 1 Kecamatan Kepanjen, SD Tulung Rejo 1 Kecamatan Ngantang, SD Pujon Kidul Kecamatan Pujon, SD Pondok Agung 4 Kecamatan Kasembon, SD. Tulung Rejo 2 Kecamatan Ngantang, SD Bantur 1 Kecamatan Bantur dan SD Wonorejo 1 Kecamatan Singosari;
2. Bulan Mei : 4 kali kegiatan di SD Pandansari Kecamatan Poncokusumo, SD Sumberputih Kecamatan Wajak, Taman Pendidikan Qurotaayun Kecamatan Kepanjen dan SD Patokpici 2 Kecamatan Wajak.
3. Bulan Juli : 2 kali kegiatan di MTs Alhidayah Kecamatan Poncokusumo dan MI Iftidaiyah Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo;
4. Bulan Agustus : 2 kali kegiatan di SD Sukosari 3 Kecamatan Kasembon dan SD Pandansari 2 Kecamatan Ngantang;
5. Bulan September : 1 kali kegiatan di SD Sekarbanyu 3 Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
6. Bulan Oktober : 2 kali kegiatan di SD Sidodadi 1 dan SD Sidodadi 3 Kecamatan Lawang;
7. Bulan November : 3 kali Kegiatan di MI Alhidayah Kasembon Kecamatan Bululawang, MI Alfatah Jatisari Kecamatan Tajinan dan SD Rowotrate 1 Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
8. Bulan Desember : 3 kali kegiatan di SD Sumpoko 3 Kecamatan Wagir, MA NU Alhidayah Kecamatan Poncokusumo dan SMP Islam Ashodiq Kuwolu Kecamatan Bululawang.

7. Mitigasi Struktural.

Kegiatan Mitigasi Struktural di Daerah Terkena Bencana yaitu Pekerjaan Bangunan Tembok Penahan Banjir Air Laut di Pantai Tamban Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Agustus 2017 sepanjang 50 Meter.

8. Mitigasi Non Struktural.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 November 2017 bertempat di Fariz Hotel Malang yang diikuti oleh 48 orang terdiri dari BPBD, Kodim, Polres Malang, OPD terkait, BMKG, RSUD, STIKES, UNIRA, Jangkar Kelud, SAR Awangga, Senkom dan Tagana. Hasil pengkajian resiko bencana terdiri dari Peta Resiko Bencana dan Dokumen Kajian Resiko Bencana.

9. Penyusunan Laporan Hasil Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kebencanaan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Dokumen Standar Kepuasan Masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pelayanan BPBD terhadap masyarakat terdampak bencana yang meliputi 440 responden yaitu Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Pujiharjo Kecamatan Ampelgading, Desa Langlang Kecamatan Singosari dan Desa Pandansari Kecamatan Ngantang. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 95,297 yang berarti mutu layanan A dan kinerja unit layanan sangat baik.

- Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain :
  - a. Melakukan kerjasama dengan USAID – APIK;
  - b. Memberdayakan masyarakat dan relawan peduli bencana; dan
  - c. Melatih relawan Siaga Bencana.
- Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pelatihan tenaga BPBD untuk meningkatkan kemampuan SDM;
  - b. Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan kerjasama USAID-APIK;
  - c. Mengajukan Proposal Program dan Kegiatan ke BNPB; dan
  - d. Penambahan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;

B. Pada Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100%, tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana (Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 71 kali dibagi jumlah kejadian bencana sebanyak 71 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan **sangat berhasil**, indikator ini didukung oleh Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pembelian paket sembako sebanyak 845 paket yang diperuntukkan bagi korban bencana.

2. Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 2-4 Agustus 2017 yang diikuti 50 Orang yang terdiri dari Kasi Trantib 33 Kecamatan, Babinsa dan Babinkamtibmas desa rawan bencana dan OPD Teknis bertempat di Hotel Solaris Malang, Kegiatan ini guna meningkatkan kompetensi dan kapabilitas aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan kaji cepat sebagai tolok ukur penentu kebijakan penanganan bencana, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Memahami Kebijakan dan Konsep Dasar Bencana;
2. Memahami Tahap Penanggulangan Kebencanaan di Kabupaten Malang;
3. Memahami Pelaksanaan Kaji Cepat Dampak Bencana;
4. Menguasai secara teknis pelaksanaan Kaji Cepat;
5. Memahami cara dan sistem pelaporan kebencanaan;
6. Memahami alur penyampaian bantuan serta pengerahan relawan;
7. Memahami tindak lanjut pemerintah daerah pada saat pasca bencana; dan
8. Koordinasi yang baik antara pihak yang terkait.

3. Peningkatan Penanganan Kedaruratan.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari – 31 Desember 2017 yang dilaksanakan di seluruh wilayah kabupaten Malang. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan kaji cepat yang responsif dan up date guna pengkajian data awal bencana sebagai penentu kebijakan dan memberikan laporan yang bersifat realtime kepada pimpinan serta bahan koordinasi dengan OPD teknis terkait.

4. Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan selama tahun 2017 sebanyak 71 kejadian bencana yang telah ditangani, antara lain : Tanah longsor sebanyak 32 kali kejadian, Angin puting beliung sebanyak 28 kali kejadian, Banjir sebanyak 9 kali kejadian, Tanah Gerak 2 kali kejadian, Kebakaran Pemukiman sebanyak 2 kali kejadian.

5. Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 25-26 Oktober 2017 yang diikuti oleh 40 Orang terdiri dari Kasi Trantib Kecamatan rawan bencana, Perwakilan desa rawan bencana, Perwakilan dari Polres, Perwakilan dari KODIM 0818 Malang-Batu, Perwakilan Lanal dan Polairut serta OPD Teknis yang bertempat di Hotel Solaris Malang.

- Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
  - a. Adanya dukungan dan logistik yang memadai dalam penanganan tanggap darurat bencana;
  - b. Koordinasi dan komunikasi lintas organisasi perangkat daerah dan lembaga-lembaga/ potensi lainnya terkait penanggulangan bencana terjalin dengan baik;
  - c. Didukung sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang cukup untuk tugas-tugas penanganan tanggap darurat bencana.
  
- Untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana pada tahun yang akan datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan penyediaan dana, logistik dan peralatan yang cukup dalam penanganan tanggap darurat bencana ;
  - b. Meningkatkan sinergitas antar organisasi perangkat daerah dan lembaga/potensi lainnya yang terkait dalam penanganan penanggulangan bencana;
  - c. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanggulangan bencana secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, simulasi/gladi lapangan dan lainnya.
  - d. Melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, termasuk gotong royong dengan masyarakat.

C. Pada Indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan target 81% tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan, Capaian 81% dapat dikatakan **berhasil** kegiatan ini didukung oleh Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana dengan kegiatan :

1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana).

Kegiatan ini telah dilaksanakan Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Pasca Bencana melalui Sistem Informasi Desa (SID) untuk operator website desa yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 April 2017 yang diikuti oleh 30 orang operator desa bertempat di El Hotel. Untuk melihat hasil pelatihan dan penerapan SID dilakukan monitoring dan evaluasi

serta asisitensi teknis untuk desa yang telah mendapat pelatihan SID yang dimulai bulan Mei sampai dengan bulan September 2017. Total Desa yang mendapat pelatihan SID ada 16 Desa yaitu :

1. Desa Pandansari Kecamatan Ngantang;
  2. Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon;
  3. Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
  4. Desa Bendosari Kecamatan Pujon;
  5. Desa Srigonco Kecamatan Bantur;
  6. Desa Tamansari Kecamatan Ampelgading;
  7. Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo;
  8. Desa Ngroto Kecamatan Pujon;
  9. Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang;
  10. Desa Pagersari Kecamatan Ngantang;
  11. Desa Sidoasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
  12. Desa Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
  13. Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading
  14. Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading;
  15. Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan; dan
  16. Desa Gedangan Kecamatan Gedangan.
2. Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya, Psikososial Pasca Bencana. Kegiatan Pelatihan Pendampingan Psikologi Pasca Bencana bagi relawan desa yang terbagi pada dua tahap. Tahap I tanggal 18-20 April 2017 sebanyak 15 desa dan tahap II tanggal 24-26 Juli 2017 yang diikuti 30 orang terdiri masing-masing tahap sebanyak 15 orang yang terdiri 8 orang operator desa dan 7 orang relawan desa bertempat di El Hotel.
3. Sarana Prasarana Adaptif Dengan Bencana. Kegiatan Uji Publik Kajian Sosial Ekonomi di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo dan Workshop Struktur Hunian dan Sarana Prasarana Aman Bencana yang dilaksanakan pada tanggal 10-13 Oktober 2017 diikuti oleh 60 peserta terdiri dari BPBD, OPD teknis terkait dan masyarakat Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo yang bertempat di Hotel Solaris. Hasil kegiatan adalah Finalisasi Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo serta Sosialisasi tentang Rumah Ramah Bencana Tahan Gempa yang diharapkan dapat menjadi rumah ramah bencana pada saat bedah rumah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang serta dapat menjadi panduan bagi desa-desa terdampak agar dapat melakukan pengurangan resiko bencana melalui rumah ramah bencana.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang sistematis dan terukur dalam upaya penanggulangan bencana. Upaya yang dapat dilakukan baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang dapat dikurangi.

Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian bencana adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

### **3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN**

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. APBD yang ada di BPBD saat ini dirasa masih sangat kurang dan perlu ada penambahan dana karena dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat yang berguna untuk pencegahan/preventif terhadap bencana, penanganan bencana yang responsif dan pemulihan dampak bencana yang terjadi.

**Tabel 3.5**  
**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	1.148.488.000,-	19,19 %
2	Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik	Persentase Penanganan bencana	3.148.000.000,-	52,59 %
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	633.699.200,-	10,59 %

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang baik/optimal	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	77 %	100 %	77 %	1.148.488.000,-	1.134.563.650,-	98,79 %
Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik	Persentase Penanganan bencana	100 %	100 %	100 %	3.148.000.000,-	2.494.830.060,-	79,25 %
Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	81 %	100 %	81 %	633.699.200,-	633.669.200,-	99,99 %

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang baik/optimal	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	77 %	98,79 %	1,28
2	Terwujudnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Responsif dan Dukungan Logistik serta Peralatan untuk Penanganan Penanggulangan Bencana yang Lebih Baik	Persentase Penanganan Bencana	100 %	79,25 %	0,79
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana yang Lebih Baik dari sebelum terjadi bencana	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	81 %	99,99 %	0,99

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja anggaran yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	88.800.000,-	88.800.000,-	100%
2	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	177.433.000,-	170.768.650,-	96,24%
		Rencana Pengurangan Resiko Bencana	100.000.000,-	100.000.000,-	100%
		Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	288.400.000,-	288.400.000,-	100%
		Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	148.995.000,-	148.995.000,-	100%
		Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	90.000.000,-	90.000.000,-	100%
3	Mitigasi Bencana	Mitigasi Struktural	100.000.000,-	100.000.000,-	100%
		Mitigasi Non Struktural	104.860.000,-	97.600.000,-	93,08%

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
4	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Penyusunan Laporan Hasil Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kebencanaan	50.000.000,-	50.000.000,-	100%
5	Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana	150.000.000,-	150.000.000,-	100%
		Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah	90.000.000,-	90.000.000,-	100%
		Peningkatan Penanganan Kedaruratan	108.000.000,-	108.000.000,-	100%
		Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	2.700.000.000,-	2.046.863.060,-	75,81%
		Penguatan dan Pengoperasian Sistem Komando Tanggap Darurat	100.000.000,-	99.967.000,-	99,97%
6	Rehabilitasi – Rekonstruksi Sarana dan Prasarana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (pasca bencana)	203.199.200,-	203.199.200,-	100%

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
		Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana	168.395.000,-	168.365.000,-	99.98%
		Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana	262.105.000,-	262.105.000,-	100%
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.580.000,-	5.580.000,-	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.480.000,-	16.864.930,-	91.26%
		Penyediaan Administrasi Keuangan	262.515.000,-	246.915.000,-	94,06%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.600.000,-	15.600.000,-	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.097.400,-	43.097.400,-	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.000.000,-	48.000.000,-	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.791.000,-	3.791.000,-	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.665.000,-	7.665.000,-	100%

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Makanan dan Minuman	23.512.500,-	23.512.500,-	100%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	210.993.000,-	210.993.000,-	100%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	118.420.000,-	118.420.000,-	100%
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	62.437.000,-	59.752.000,-	95.70%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	149.921.700,-	149.029.862,-	99,41%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.080.000,-	1.080.000,-	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.440.000,-	9.440.000,-	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	3.010.000,-	3.010.000,-	100%
9	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	26.400.000,-	26.198.700,-	99,24%

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
10	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	11.340.000,-	10.685.000,-	94,22%
11	Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.078.100,-	20.718.100,-	98,29%
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	6.546.000,-	6.546.000,-	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6.559.000,-	6.559.000,-	100%

### C. PRESTASI TAHUN 2017

Prestasi yang diraih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2017 yaitu Tingkat Provinsi Lomba Desa Tangguh Bencana Terbaik Kategori Utama Bidang Administrasi dan Legislasi Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang diwakili oleh Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya Good Governance. Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah 100% sehingga termasuk kategori ***Sangat Berhasil***.

Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, hal ini berarti bahwa kinerja dari pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan Kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan;
3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana;
4. Belum optimalnya peran pihak swasta dalam proses pengurangan risiko bencana.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, sosialisasi, workshop, gladi lapang dan sebagainya;
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis serta mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan semua lapisan masyarakat serta instansi/lembaga pemerhati bencana.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu Laporan Kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai program/kebijakan sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MALANG

**Drs. BAMBANG ISTIAWAN**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670303 198602 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BAMBANG ISTIAWAN

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. H. RENDRA KRESNA

Jabatan : Bupati Malang

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang,

2017

Pihak Kedua  
  
  
DR. H. RENDRA KRESNA

Pihak Pertama  
  
  
Drs. BAMBANG ISTIAWAN  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670303 198602 1 003

# PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Tahun Anggaran : 2017

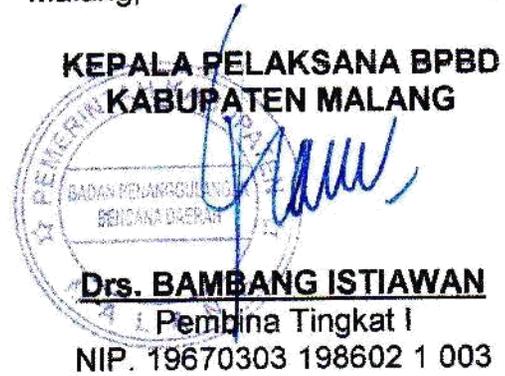
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan kewaspadaan akan kerawanan bencana alam	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana	17%
		Persentase Kemampuan tentang Kebencanaan	77%
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	70%
		Nilai SKM Pelayanan Kebencanaan	68%
2	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik	Persentase Penanganan darurat bencana	100%
		Persentase bantuan logistik dan persentase dukungan peralatan penanggulangan bencana	100%
		Persentase bantuan sosial terhadap korban bencana	100%
3	Terwujudnya pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana	Jumlah obyek terdampak yang ditangani	81%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 88.800.000	APBD
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	Rp. 804.828.000	APBD
3	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rp. 3.148.000.000	APBD
4	Program Rehabilitasi – Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	Rp. 633.699.200	APBD
5	Program Mitigasi Bencana	Rp. 204.860.000	APBD
6	Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Rp. 50.000.000	APBD
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 757.653.900	APBD
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 225.888.700	APBD
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 26.400.000	APBD

10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	11.340.000	APBD
11	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	34.183.100	APBD

Malang,

2017



## PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	77%	100%	77%
2	Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik	Persentase Penanganan bencana	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	81%	100%	81%

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula / Rumus	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
	Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan prilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Tujuan 1 : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup Sasaran 2 : Meningkatkan sistim penanggulangan bencana yang responsif									
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal	Meningkatnya kewaspadaan akan kerawanan bencana alam	Peningkatan jumlah desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk / jumlah target desa tangguh bencana X 100%	17 Desa	20 Desa	23 Desa	26 Desa	29 Desa	32 Desa
Persentase kemampuan tentang kebencanaan			Jumlah komunitas masyarakat PB yang dibina / Jumlah komunitas masyarakat PB pada daerah rawan bencana X 100%	77%	80%	83%	85%	87%	90%	
Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana			Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana / jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat X 100 %	70%	70%	73%	75%	80%	90%	
Nilai SKM pelayanan Kebencanaan			Jumlah laporan hasil SKM pelayanan kebencanaan tepat waktu / Jumlah laporan hasil SKM pelayanan yang dibuat X 100 %	68%	70%	73%	75%	78%	80%	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula / Rumus	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
2	Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik.	Terwujudnya penanganan darurat bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik	Presentase penanganan darurat bencana	Jumlah bencana yang ditangani / jumlah kejadian bencana X 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase bantuan logistik dan prosentase dukungan peralatan penanggulangan bencana	Jumlah bantuan logistik / jumlah kejadian bencana yang ditangani X100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase bantuan sosial terhadap korban bencana	Jumlah bantuan sosial yang diberikan / jumlah kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik	Peningkatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang terjadi	Jumlah obyek terdampak yang ditangani	Jumlah obyek terdampak yang ditangani / jumlah keseluruhan obyek terdampak X 100 %	80%	81%	82%	83%	84%	85%



**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2021)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penanggulangan bencana daerah	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran;	Persentase administrasi pelayanan perkantoran	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	574.570.600	100%	516.989.720	100%	620.387.664	100%	744.465.197	100%	893.358.236	100%	1.965.388.124	Sekretariat	Kab Malang
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim tepat waktu	2055 surat	2107 surat	125.700.000	2203 Surat	150.840.000	2525 surat	181.008.000	2700 surat	217.209.600	2800 surat	260.651.520	2850 surat	312.781.824	Sekretariat	Kab Malang
			penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar tepat waktu	48 rekening	100%	18.480.000	48 rekening	22.176.000	48 rekening	26.611.200	48 rekening	31.933.440	48 rekening	38.320.128	48 rekening	45.984.154	Sekretariat	Kab Malang
			Penyediaan Jasa Administrasi dan keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi dan keuangan	96 orang	96 orang	47.520.000	96 Orang	57.024.000	96 Orang	68.428.800	96 Orang	82.114.560	96 Orang	98.537.472	96 Orang	118.244.966	Sekretariat	Kab Malang
			Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah peenyediaan jasa kebersihan	1 paket	1 paket	12.600.000	1 paket	15.120.000	100%	18.144.000	100%	21.772.800	100%	26.127.360	100%	31.352.832	Sekretariat	Kab Malang
			Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	51.805.000	1 paket	62.166.000	100%	74.599.200	100%	89.519.040	100%	107.422.848	100%	128.907.418	Sekretariat	Kab Malang
			Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	1 paket	1 paket	31.665.600	1 paket	37.998.720	100%	45.598.464	100%	54.718.157	100%	65.661.788	100%	78.794.146	Sekretariat	Kab Malang
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	jumlah penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan selama 1 tahun	1 paket	1 paket	3.000.000	1 paket	3.600.000	100%	4.320.000	100%	5.184.000	100%	6.220.800	100%	7.464.960	Sekretariat	Kab Malang
			Penyediaan makan dan minum	rapat staf meeting, rakor dinas/instansi, mamin tamu	750 pack	750 pack	7.500.000	768 pack	9.000.000	780 pack	10.800.000	790 pack	12.960.000	800 pack	15.552.000	800 pack%	18.662.400	Sekretariat	Kab Malang
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat koordinasi dinas luar daerah	220 Orang	220 Orang	272.100.000	220 Orang	154.025.000	225 orang	184.830.000	240 orang	221.796.000	260 orang	266.155.200	265 orang	319.386.240	Sekretariat	Kab Malang			

			Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya rapat koordinasi dinas dalam daerah	260 Orang	260 Orang	272.100.000	260 Orang	108.375.000	275 orang	130.050.000	290 orang	156.060.000	300 orang	187.272.000	310 orang	224.726.400	Sekretariat	Kab Malang
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana aparat	Persentase sarana dan prasarana aparat yang berfungsi dengan baik	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparat</b>	<b>Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	100%	100%	296.240.000	100%	1.162.015.200	100%	1.743.022.800	100%	2.614.534.200	100%	3.921.801.300	100%	1.960.900.650	Sekretariat	Kab Malang	
			Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	3 Unit	3 Unit	50.000.000	3 Unit	95.160.000	3 Unit	142.740.000	3 Unit	214.110.000	3 Unit	321.165.000	3 Unit	160.582.500	Sekretariat	Kab Malang
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 unit	3 unit	75.000.000	3 unit	50.470.200	3 unit	75.705.300	3 unit	113.557.950	3 unit	170.336.925	3 unit	85.168.463	Sekretariat	Kab Malang
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 paket			1 paket	759.885.000	1 paket	1.139.827.500	1 paket	1.709.741.250	1 paket	2.564.611.875	1 paket	1.282.305.938	Sekretariat	Kab Malang
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	9 Unit	9 Unit	170.520.000	9 Unit	255.780.000	10 Unit	383.670.000	13 Unit	575.505.000	15 Unit	863.257.500	17 Unit	431.628.750	Sekretariat	Kab Malang
			Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	720.000	2 Unit	720.000	2 Unit	1.080.000	2 Unit	1.620.000	2 Unit	2.430.000	2 Unit	1.215.000	Sekretariat	Kab Malang
			Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	6 Unit	6 Unit	7.980.800	6 Unit	4.500.000	6 Unit	6.750.000	6 Unit	10.125.000	6 Unit	15.187.500	6 Unit	7.593.750	Sekretariat	Kab Malang
			Pemeliharaan rutin/berkala meubleair	Jumlah meubleair yang mendapat pemeliharaan	25 set	25 set	1.750.000	25 set	1.750.000	25 set	2.625.000	25 set	3.937.500	25 set	5.906.250	25 set	2.953.125	Sekretariat	Kab Malang
Meningkatnya kapasitas sumber daya dan disiplin aparat	Persentase kapasitas sumber daya dan disiplin aparat	<b>program peningkatan disiplin aparat</b>	<b>Cakupan pemenuhan disiplin aparat</b>	100%	100%	25.000.000	100%	37.500.000	100%	56.250.000	100%	84.375.000	100%	126.562.500	100%	189.843.750	Sekretariat	Kab Malang	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah seragam yang dibutuhkan	33 stel	33 stel	25.000.000	33 stel	37.500.000	36 stel	56.250.000	40 stel	84.375.000	45 stel	126.562.500	50 stel	189.843.750	Sekretariat	Kab Malang
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparat</b>	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	109.807.500	Sekretariat	Kab Malang
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5 orang	5 orang	50.000.000	5 orang	75.000.000	7 orang	112.500.000	9 orang	168.750.000	11 orang	253.125.000	13 orang	379.687.500	Sekretariat	Kab Malang

	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga	Prsentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel	<b>program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD</b>	<b>Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel</b>	100%	100%	23.470.700	100%	28.164.840	100%	33.797.808	100%	40.557.370	100%	48.668.844	100%	58.402.612	Sekretariat	Kab Malang
			penyusunan lap capaian kinerja dan inltisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja BPBD	4 dok	4 dok	15.000.000	4 dok	18.000.000	5 dok	21.600.000	5 dok	25.920.000	5 dok	31.104.000	5 dok	37.324.800	Sekretariat	Kab Malang
			penyusuna laporan keuangan semesteran	laporan keuangan semesteran BPBD (jumlah dokumen)	1 dok	1 dok	3.677.700	1 dok	4.413.240	1 dok	5.295.888	1 dok	6.355.066	1 dok	7.626.079	1 dok	9.151.294	Sekretariat	Kab Malang
			penyusuna pelaporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun (jumlah Dokumen)	1 dok	1 dok	4.793.000	1 dok	5.751.600	1 dok	6.901.920	1 dok	8.282.304	1 dok	9.938.765	1 dok	11.926.518	Sekretariat	Kab Malang
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal	Meningkatnya kewaspadaan akan kerawanan bencana alam	Peningkatan Jumlah Desa Tangguh	<b>Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Beencana Alam</b>	<b>Persentase Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam</b>	75%	75%	74.000.000	77%	88.800.000	79%	106.560.000	81%	127.872.000	83%	153.446.400	85%	184.135.680	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang
			Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam	Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam	33 Kec	33 Kec	74.000.000	33 Kec	88.800.000	33 Kec	106.560.000	33 Kec	127.872.000	33 Kec	153.446.400	33 Kec	184.135.680	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang
			<b>program pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan</b>	75%	75%	3.003.400.000	77%	3.604.080.000	79%	4.324.896.000	81%	5.189.875.200	83%	6.227.850.240	85%	7.473.420.288	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	
			Pemberdayaan Masyarkat dalam menghadapi bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	17 Desa	3 Desa	150.000.000	3 Desa	180.000.000	3 Desa	216.000.000	3 Desa	259.200.000	3 Desa	311.040.000	32 Desa	373.248.000	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang
			Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	48.000.000	1 kegiatan	57.600.000	1 kegiatan	69.120.000	1 kegiatan	82.944.000	1 kegiatan	99.532.800	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana	3 paket	3 paket	2.500.000.000	3 paket	3.000.000.000	3 paket	3.600.000.000	4 paket	4.320.000.000	5 paket	5.184.000.000	6 paket	6.220.800.000	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang

			Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana / piket kesiapsiagaan bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	238.400.000	1 kegiatan	286.080.000	1 kegiatan	343.296.000	1 kegiatan	411.955.200	1 kegiatan	494.346.240	1 kegiatan	593.215.488	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang
			Sosialisasi (enanggulangan Bencana di Sekolah ( PENA SEKOLAH )	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah ( PENA SEKOLAH )	25 sekolah	25 sekolah	75.000.000	30 sekolah	90.000.000	30 sekolah	108.000.000	35 sekolah	129.600.000	40 sekolah	155.520.000	45 sekolah	186.624.000	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang
		Persentase kemampuan tentang kebencanaan	<b>Program Peningkatan Mitigasi Beencana Alam</b>	<b>Persentase Mitigasi Bencana</b>	0 %			75%	0	80%	0	85%	0	90%	0	93%	0	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	
			Kegiatan Mitigasi Struktural	Jumlah mitigasi struktural yang dilaksanakan				1 paket	0	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan									
			Kegiatan Mitigasi Non Struktural	Jumlah advokasi dan riset kesiapsiagaan bencana				1 dok	0	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan									
		Nilai SKM pelayanan kebencanaan	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan</b>	<b>Nilai SKM</b>				75%	0	80%	0	85%	0	90%	0	93%	0	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	
			Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil SKM pelayanan penanggulangan bencana	Jumlah dokumen laporan hasil SKM pelayann kebencanaan				1 Dok	0	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan									
Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik	Terwujudnya penanganan darurat bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik dan peralatan	Persentase penanganan bencana	<b>program Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana</b>	<b>Prosentase Penanganan Bencana</b>	100%	100%	1.615.000.000	100%	1.938.000.000	100%	2.295.600.000	100%	2.754.720.000	100%	3.305.664.000	100%	3.966.796.800	Bidang Kedaruratan & Logistik	Kab Malang
			Peningkatan penanganan kedaruratan	Jumlah assesment / kaji cepat penanganan kebencanaan	40 kali	40 kali	90.000.000	50kali	108.000.000	55 kali	129.600.000	60 kali	155.520.000	65 kali	186.624.000	70 kali	223.948.800	Bidang Kedaruratan & Logistik	Kab Malang
			Tanggap Darurat di Daerah terkena bencana	Jumlah penanganan ketanggap darurat	1 tahun	1 tahun	1.200.000.000	1 tahun	1.440.000.000	1 tahun	1.728.000.000	1 tahun	2.073.600.000	1 tahun	2.488.320.000	1 tahun	2.985.984.000	Bidang Kedaruratan & Logistik	Kab Malang
			Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana	jumlah ketersediaan barang logistik dan peralatan	400 paket	400 paket	250.000.000	450 paket	300.000.000	500 paket	330.000.000	550 paket	396.000.000	600 paket	475.200.000	650 paket	570.240.000	Bidang Kedaruratan & Logistik	Kab Malang

			Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di daerah	Jumlah aparaturnya yang terlatih dalam tanggap darurat bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	90.000.000	1 kegiatan	108.000.000	1 kegiatan	129.600.000	1 kegiatan	155.520.000	1 kegiatan	186.624.000	Bidang Kedaruratan & Logistik	Kab Malang
			Penguatan dan pengoperasian sistem komando bencana	Jumlah pelatihan sistem komando bencana				0	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	0		Bidang Kedaruratan & Logistik	
Meningkatkan pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik	Pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik	Jumlah obyek terdampak yang ditangani	<b>program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana</b>	<b>Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>19.723.369.400</b>	<b>78%</b>	23.668.043.280	<b>80%</b>	<b>28.401.651.936</b>	<b>85%</b>	<b>34.081.982.323</b>	<b>87%</b>	<b>40.898.378.788</b>	<b>90%</b>	<b>49.078.054.545</b>	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi	Kab Malang
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak ( Pasca Bencana)	Jumlah dokumen JITU PASNA dan rehabilitasi sarana prasarana yang rusak		1 paket	19.623.369.400	1 paket	23.548.043.280	1 paket	28.257.651.936	1 paket	33.909.182.323	1 paket	40.691.018.788	1 paket	48.829.222.545	Kasi Rekonstruksi	Kab Malang
			Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana	Jumlah Penanganan Rehabilitasi Kehidupan Masyarakat terdampak		1 paket	50.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	72.000.000	1 paket	86.400.000	1 paket	103.680.000	1 paket	124.416.000	Kasi Rehabilitasi	Kab Malang
			Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana	Jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdampak bencana		1 paket	50.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	72.000.000	1 paket	86.400.000	1 paket	103.680.000	1 paket	124.416.000	Kasi Rekonstruksi	Kab Malang
			<b>Jumlah</b>				<b>25.385.050.700</b>		<b>30.462.060.840</b>		<b>37.642.666.208</b>		<b>45.704.931.290</b>		<b>55.648.935.308</b>		<b>64.986.749.949</b>		

**PENGHARGAAN BPBD KABUPATEN MALANG TAHUN 2017**

